

APLIKASI PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN UNIT SIMPAN PINJAM (USP) KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

Oleh:

Endang Sri Gunawati¹⁾, Asteria Pudyantini¹⁾

¹⁾Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRACT

This research has the aims to analyze the health rate of KPRI KBK and KPRI MGR cooperative in Purworejo Regency and analyze owners equity development and their income after tax during the period of 2007, 2008 and 2009. The research on cooperative health rate according to the Rule of The State Minister of Cooperative and KUKM is based on 7 (seven) aspects, they are capital, the quality of productive assets, management, efficiency, liquidity, self sufficiency and growth and cooperative identity. Besides that this research also aims to analyze owners equity development and its income after tax from KPRI KBK and KPRI MGR cooperative in Purworejo Regency. The data include the financial report of KPRI KBK and KPRI MGR cooperative in Purworejo Regency during the period 2007, 2008 and 2009. The rule of The State Minister of Cooperative and Small and Medium Business No14/Per/M.KUKM/XII/2009, December 22nd 2009 is used to analyze the health rate of KPRI KBK and KPRI MGR cooperative in Purworejo Regency. The total scores received from the calculation is used to determine the health rate of KPRI KBK and KPRI MGR in Purworejo Regency and then to analyze the development of owners equity and income after tax, linear trend is applied. The result of analysis shows that the health rate of KPRI KBK in Purworejo Regency during the period of 2007, 2008 and 2009 has got the predicate of "Sufficient Healthy" as during the three years continuously has got the score of 75.00; 74.00 and 74.00 (the scores are located between 60 X 80), whereas KPRI MGR cooperative in Purworejo Regency during the period of 2007, 2008 and 2009 also has got the predicate of Sufficien Healthy as within the period of three years continuously has got the scores of 70.40; 68.90 and 69.00. From the analysis of the development of owners equity and income after tax during the period 2007, 2008 and 2009, it has got the result that whether KPRI KBK or KPRI MGR cooperatives in Purworejo Regency, there is an increasing tendency of their owners equity and income after tax. Finally based on the result of research, KPRI KBK cooperatives in Purworejo Regency has to increase the component that can increase owners equity such as increasing the amount of deposit from its members. Besides that KPRI KBK cooperatives in Purworejo Regency have to open long term deposit or credit facilities with competitive and the decreasing the operating costs in order to incease efficiency assessment aspect in the ratio of operating income towards brutto income after tax. The Departement of Cooperative has to carry out the socialization of cooperative health evaluation periodically and regularly so the cooperatives available can make a self assessment on their saving and borrowing units and the can overcome the problem when there is decreasing score on cooperative assessment.

Keywords: *evaluation of cooperative health rate, owners equity and net income after tax.*

PENDAHULUAN

UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan menjadi dasar dan mengatur perekonomian nasional Indonesia. Selanjutnya, penjelasan pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Penjelasan pasal 33 ini menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, hal ini dijelaskan dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi seperti tersebut di atas, maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan

dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi.

Sampai saat ini, ekonomi koperasi masih merupakan cita-cita dan harapan. Sejak kemerdekaan, ekonomi koperasi telah menjadi model yang dituju, sebagaimana tertuang pada UUD 1945 pasal 33 ayat 1, yang menyatakan bahwa: Perkonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Dengan demikian dasar ekonomi mestilah usaha bersama dikerjakan secara kekeluargaan. Bung Hatta memiliki cita-cita agar ekonomi Pancasila tidak lagi sekedar menjadi dokumen historis dan retorika politik, tapi dapat dijadikan pijakan kebijakan bangsa, terwujudnya ekonomi kerakyatan, perekonomian yang mampu mengangkat kehidupan rakyat yang semakin makmur disertai keadilan yang semakin baik. (Latief D, 2000).

Koperasi dilandasi oleh kepentingan anggota sebagai kolektifitas sosial, perkumpulan orang bukan perkumpulan modal, namun sebagai lembaga ekonomi koperasi harus mampu bertahan dan menghadapi persaingan. Oleh sebab itulah koperasi masuk dalam sistem ekonomi sosialis atau ekonomi campuran. Ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sosialisme dan kapitalisme. Beberapa konsep dasar: (1) Maksimisasi profit merupakan kondisi perlu, dan kesejahteraan anggota merupakan kondisi cukup. (2) Pemerintah sebagai pengendali *free economics*. (Rachbini DJ, 2002)

Namun dalam entitas perekonomian, koperasi juga menghadapi masalah yang sama sebagaimana lembaga perekonomian lain seperti meningkatnya persaingan, perubahan permintaan dan penawaran, perubahan harga dan sebagainya. Oleh sebab itu efektivitas dan efisiensi pengelolaan usaha harus benar-benar diperhatikan, sehingga menjadi koperasi yang ber prestasi, yaitu koperasi yang para anggotanya merasa sejahtera dengan bergabung di dalamnya dan memetik manfaatnya (Anoraga, 2002).

Masalah-masalah yang dihadapi dalam pengembangan usaha koperasi tidak dapat dipisahkan dari masalah kelembagaan serta alat kelengkapan organisasi koperasi dan kemampuan

para pengelolanya. Adapun masalah yang berkaitan dengan pengembangan usaha salah satunya adalah belum sepenuhnya tercipta jaringan mata rantai tataniaga yang efektif dan efisien, baik dalam pemasaran hasil produksi anggotanya maupun dalam distribusi bahan kebutuhan pokok para anggotanya (Nasution, 2000)

Sistem ekonomi Indonesia merupakan sistem ekonomi campuran, yaitu dalam kegiatan ekonomi tidak hanya dikuasai oleh pemerintah tetapi adanya campur tangan dari masyarakat juga. Dalam hal ini ada tiga sektor kekuatan ekonomi yang melaksanakan berbagai kegiatan usaha dalam tatanan kehidupan perekonomian Indonesia, yaitu sektor negara, sektor swasta dan koperasi. Untuk mencapai kedudukan ekonomi yang kuat dan mencapai masyarakat adil dan makmur, maka ketiga sektor ekonomi tersebut harus saling berhubungan dan bekerja sama.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 1 menyebutkan bahwa "Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan". Pengertian ini mengisyaratkan bahwa koperasi adalah badan hukum yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi pada dasarnya koperasi merupakan salah satu badan usaha yang sekaligus merupakan pranata ekonomi Indonesia umumnya didirikan dengan harapan dapat mengatasi persoalan anggotanya. Untuk itu koperasi perlu dibina secara profesional baik dalam bidang organisasi maupun dalam bidang mental dan usaha.

Koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi yang menurut Muhammad Hatta (Bapak Koperasi Indonesia) adalah lembaga ekonomi yang paling cocok jika diterapkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan sifat masyarakat Indonesia yang tinggi kolektifitasannya dan kekeluargaan.

Tabel 1. Total Aktiva, Hutang Jangka Panjang dan Modal Sendiri dari KPRI KBK dan MGR Kabupaten Purworejo Tahun 2007, 2008 dan 2009

Tahun	Total Aktiva (Rp)	Hutang Jk Pjng (Rp)	Modal Sendiri (Rp)
Koperasi KBK			
2007	1,524,026,384,410	82,685,246,000	1,393,472,366,115
2008	1,699,456,400,360	95,440,056,000	1,554,282,129,865
2009	1,832,908,452,100	127,469,596,000	1,653,466,027,565
Koperasi MGR			
2007	2,390,808,873	43,000,000	1,049,266,045
2008	3,077,100,960	546,666,500	1,198,348,096
2009	3,782,201,698	902,353,200	1,497,643,268

Sumber: KPRI MGR dan KBK Kabupaten Purworejo

Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari:

1. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor,
2. Penyedia lapangan kerja yang terbesar,
3. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat,
4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta
5. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang. Pemberdayaan KUMKM secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional di atas 6% per tahun, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat.

Dengan melihat bukti nyata peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) dalam perekonomian Indonesia tersebut diatas, maka koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengeluarkan Peraturan No. 14/PER/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang merupakan revisi dari Peraturan No.20/PER/M.KUKM/XI/2008 tanggal 14 November 2008. Penilaian ini didasarkan pada 7 aspek, yaitu Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, serta Jatidiri Koperasi dengan batasan-batasan sesuai dengan peraturan tersebut diatas.

Peneliti tertarik untuk meneliti tingkat kesehatan koperasi KPRI KBK dan MGR Kabupaten Purworejo. Alasan peneliti memilih koperasi tersebut karena koperasi tersebut merupakan koperasi pegawai negeri yang cukup banyak anggotanya dan modal usahanya cukup besar.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang meneliti tentang kesehatan koperasi diantaranya, penelitian yang menggunakan objek penelitian Koperasi Karyawan PT. Kereta Api Poncol (KOPERKAPP). Penelitian ini menggunakan acuan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor

194/USP/M/IX/1998 tanggal 25 September 1998 tentang Petunjuk Penilaian Kesehatan Unit Simpan Pinjam dengan melihat aspek Permodalan, aspek Kualitas Aktiva Produktif, aspek Rentabilitas, aspek Likuiditas, dan aspek Manajemen. Periode penelitian selama 2 tahun yaitu tahun 2003-2004. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa untuk tahun 2003 mendapatkan skor 68,52 dengan predikat "Cukup Sehat" dan untuk tahun 2004 mendapatkan skor 68,85 dengan predikat "Cukup Sehat" (Prasetyo, 2006).

Tabel 2. Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi

Skor	Predikat
80 X < 100	"Sehat"
60 X < 80	"Cukup Sehat"
40 X < 60	"Kurang Sehat"
20 X < 40	"Tidak Sehat"
< 20	"Sangat Tidak Sehat"

Sebagai gambaran awal tentang keuangan KPRI KBK dan MGR Kabupaten Purworejo, berikut ini dipaparkan data mengenai aktiva, hutang jangka panjang dan modal sendiri seperti terlihat pada tabel 1.

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa total aktiva dan modal sendiri serta hutang jangka panjang selama tiga tahun terlihat mengalami kenaikan. Hal ini dapat dijadikan dasar bahwa KPRI KBK dan MGR Kabupaten Purworejo selama tiga tahun usahanya cukup berhasil. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diadakan penelitian tentang "Aplikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam (Usp) Koperasi Pegawai Republik Indonesia".

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dengan menggunakan metode studi kasus, yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan (Indriantoro dan Supomo, 1999:26).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau obyek yang menjadi sasaran penelitian penulis. Dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian ialah koperasi KPRI KBK dan MGR di Kabupaten Purworejo.

3. Definisi Operasional

- a. Kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan "Sehat", "Cukup Sehat", "Kurang Sehat", "Tidak Sehat" dan "Sangat Tidak Sehat".

Tabel 3. Penilaian Peringkat Kesehatan Koperasi pada KPRI KBK Tahun 2007, 2008, dan 2009

No.	Aspek Penilaian	Skor		
		2007	2008	2009
1	Permodalan:			
	a. Rasio MS thd Total Asset	1.5	1.5	1.5
	b. Rasio MS thdp Pinj. Diber yg berisiko	6	6	6
	c. Rasio kecukupan modal tetap	3	1.5	1.5
2	Kualitas Aktiva Produktif:			
	a. Vol Pinj. pd angg / Vol Pinj. diber	10	10	10
	b. Rasio Rsk Pinj bermasalah thd Pinj yg diber	5	5	5
	c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah	0	0	0
	d. Rasio Pinjaman yg berisiko terhadap Pinjaman yg diberikan	5	5	5
3	Manajemen:			
	a. Manajemen Umum	2.5	2.5	2.5
	b. Manajemen Kelembagaan	3	3	3
	c. Manajemen Permodalan	3	3	3
	d. Manajemen Aktiva	3	3	3
	e. Manajemen Likuiditas	3	3	3
4	Efisiensi:			
	a. Rasio Beban operasi anggota terhadap Partisipasi Bruto	4	4	4
	b. Rasio Beban Usaha thd SHU Kotor	3	3	3
	c. Rasio Efisiensi Pelayanan	1.5	2	2
5	Likuiditas:			
	a. Rasio Kas+Bank thd Kewaj Lncr	2.5	2.5	2.5
	b. Rasio Pinjaman yg diberikan terhadap Dana yang diterima	5	5	5
6	Kemandirian dan Pertumbuhan:			
	a. Rentabilitas Asset	1.5	1.5	1.5
	b. Rentabilitas Modal Sendiri	1.5	1.5	1.5
	c. Kemandirian Operasional Plynn	4	4	4
7	Jatidiri Koperasi:			
	a. Rasio Partisipasi Bruto	7	7	7
	b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota	0	0	0
Jumlah		75	74	74

b. Penilaian kesehatan koperasi adalah penilaian terhadap ukuran kinerja koperasi dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, pertumbuhan dan atau perkembangan serta keberlang-sungan usaha koperasi dalam jangka pendek dan jangka panjang.

c. Aspek yang dinilai dalam penilaian kesehatan koperasi adalah aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan serta aspek jatidiri koperasi. Aspek Permodalan adalah aspek untuk mengetahui seberapa besar modal yang dimiliki koperasi untuk membiayai usahanya. Aspek ini terdiri dari rasio modal sendiri terhadap total asset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko dan rasio kecukupan modal sendiri.

d. Aspek Kualitas Aktiva Produktif adalah aspek yang dinilai untuk mengetahui kualitas kekayaan yang dimiliki koperasi yang dapat mendatangkan penghasilan bagi koperasi. Aspek ini terdiri dari rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan,

rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah dan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

e. Aspek Manajemen adalah aspek untuk mengetahui kepengurusan yang dilaksanakan dalam memberikan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam pelaksanaan kegiatan usaha koperasi. Aspek ini terdiri dari manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas.

f. Aspek Efisiensi adalah aspek untuk menilai seberapa efisienkah koperasi tersebut. Aspek ini terdiri dari rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap SHU kotor dan rasio efisiensi pelayanan.

g. Aspek Likuiditas adalah aspek untuk mengetahui kemampuan unit simpan pinjam koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia pada saat itu. Aspek ini terdiri dari rasio kas dan rasio

- pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.
- h. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan adalah aspek untuk menilai kemandirian dan pertumbuhan koperasi berkaitan dengan kemampuan koperasi dalam memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) dari usaha yang dijalankan selama periode tertentu. Aspek ini terdiri dari rentabilitas asset, rentabilitas modal sendiri dan kemandirian operasional pelayanan.
- i. Aspek Jatidiri koperasi adalah aspek untuk menilai jati diri koperasi. Aspek ini terdiri dari rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota (PEA).

4. Teknik Analisis Data

a. Analisis Indikator Kesehatan Koperasi

Untuk dapat memecahkan masalah dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, digunakan beberapa alat analisis (Peraturan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.

14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi antara lain:

- 1) Bobot Penilaian Aspek Komponen
 - a) Dalam melakukan penilaian kesehatan koperasi, maka terhadap aspek yang dinilai diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi tersebut.
 - b) Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 100.
- 2) Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen tersebut ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) aspek yaitu : Aspek Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan serta Jatidiri Koperasi.

b. Penetapan Kesehatan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 7, diperoleh skor secara

Tabel 4. Penilaian Peringkat Kesehatan Koperasi pada USP KPRI MGR Tahun 2007, 2008 2009

No.	Aspek Penilaian	Skor		
		2007	2008	2009
1	Permodalan:			
	a. Rasio MS thd Total Asset	6	3	3
	b. Rasio MS thdp Pinj. diberikan yg berisiko	2.4	2.4	2.4
	c. Rasio kecukupan modal tetap	1.5	3	3
2	Kualitas Aktiva Produktif:			
	a. Vol Pinj. Pd angg / Vol Pinj. Diber	10	10	10
	b. Rasio Rsk Pinj bermasalah thd Pinj yg diber	4	4	4
	c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah	0	0	0
	d. Rasio Pinjaman yg berisiko terhadap Pinjaman yg diberikan	5	5	5
3	Manajemen:			
	a. Manajemen Umum	2.5	2.5	2.5
	b. Manajemen Kelembagaan	3	3	3
	c. Manajemen Permodalan	3	3	3
	d. Manajemen Aktiva	3	3	3
	e. Manajemen Likuiditas	3	3	3
4	Efisiensi:			
	a. Rasio Beban operasi anggota terhadap Partisipasi Bruto	4	4	4
	b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor	1	1	1
	c. Rasio Efisiensi Pelayanan	2	2	2
5	Likuiditas:			
	a. Rasio Kas+Bank thd Kewaj Lncr	2.5	2.5	2.5
	b. Rasio Pinjaman yg diberikan terhadap Dana yang diterima	5	5	5
6	Kemandirian dan Pertumbuhan:			
	a. Rentabilitas Asset	0.75	0.75	0.75
	b. Rentabilitas Modal Sendiri	0.75	0.75	0.75
	c. Kemandirian Operasional Pelayanan	4	4	4
7	Jatidiri Koperasi:			
	a. Rasio Partisipasi Bruto	7	7	7
	b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)	0	0	0
Jumlah		70,40	68,90	69,00

keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu "Sehat", "Cukup Sehat", "Kurang Sehat", "Tidak Sehat" dan "Sangat Tidak Sehat".

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi

Dari hasil perhitungan diperoleh hasil tingkat kesehatan koperasi pada KPRI KBK Tahun 2007, 2008 dan 2009.

Jumlah skor hasil penilaian tingkat kesehatan USP KPRI KBK selama tiga tahun dari tahun 2007, 2008 dan 2009 adalah 75; 74; dan 74 berada pada rentang nilai antara 60 sampai dengan kurang dari 80 ($60 < X < 80$), berarti berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 termasuk dalam kategori "Cukup Sehat".

Sedangkan tingkat kesehatan KPRI MGR dari tahun 2007, 2008 dan 2009 diperoleh hasil dalam tabel 4. Jumlah skor hasil penilaian kesehatan USP KPRI MGR selama tiga tahun dari tahun 2007, 2008 dan 2009 adalah 70,40; 68,90 dan 69,00 berada pada rentang nilai antara 60 sampai dengan kurang dari 80 ($60 < X < 80$), berarti berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 termasuk dalam kategori "Cukup Sehat". Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan Koperasi KPRI KBK dan MGR Kabupaten Purworejo tahun 2007, 2008 dan 2009 memiliki predikat "Sehat", ditolak.

B. Analisis Perkembangan Modal Sendiri dan Sisa Hasil Usaha

Untuk menganalisis apakah modal sendiri dan SHU Koperasi KBK Kabupaten Purworejo mengalami kenaikan atau tidak dari tahun 2007, 2008 dan tahun 2009 dilakukan melalui perhitungan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis perkembangan Modal sendiri pada Koperasi KBK Kabupaten Purworejo selama tahun 2007, 2008 dan 2009 dilakukan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5. Perhitungan Perkembangan Modal Sendiri pada Koperasi KBK Kabupaten Purworejo

Tahun	Modal Sendiri (Y)	X	XY	X ²
2007	1,393,472,366,115.00	-1	-1,393,472,366,115	1
2008	1,554,282,129,865.00	0	0.00	0
2009	1,653,466,027,565.00	1	1,653,466,027,565	1
Jumlah	4,601,220,523,545.00	0	259,993,661,450	2

$$a = Y/n ; a = 1,533,740,174,515$$

$$b = XY / X^2 ; b = 129,996,830,725$$

Nilai b positif artinya selama tahun 2007, 2008 dan 2009 jumlah modal sendiri mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa Koperasi KBK Kabupaten Purworejo dalam menjalankan usahanya mengalami perkembangan usaha karena modal sendirinya mengalami kenaikan.

2. Untuk menganalisis perkembangan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi KBK Kabupaten Purworejo selama tahun 2007, 2008 dan 2009 dilakukan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 6. Perhitungan Perkembangan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi KBK Kabupaten Purworejo

Tahun	SHU Setelah Pajak (Y)	X	XY	X ²
2007	49,128,108	-1	-49,128,108.00	1
2008	60,947,425	0	0.00	0
2009	57,682,053	1	57,682,053.00	1
Jumlah	167,757,586	0	8,553,945.00	2

$$a = Y/n ; a = 55,919,195$$

$$b = XY / X^2 ; b = 4,276,973$$

Nilai b positif artinya selama tahun 2007, 2008 dan 2009 jumlah sisa hasil usaha mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa Koperasi KBK Kabupaten Purworejo dalam menjalankan usahanya mengalami perkembangan usaha karena sisa hasil usahanya mengalami kenaikan.

3. Untuk menganalisis perkembangan Modal sendiri pada Koperasi MGR Kabupaten Purworejo selama tahun 2007, 2008 dan 2009 dilakukan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 7. Perhitungan Perkembangan Modal Sendiri pada Koperasi MGR Kabupaten Purworejo

Tahun	Modal Sendiri (Y)	X	XY	X ²
2007	1,049,266,045	-1	-1,049,266,045.00	1
2008	1,198,348,096	0	0.00	0
2009	1,497,643,268	1	1,497,643,268.00	1
Jumlah	3,745,257,409.00	0	448,377,223.00	2

$$a = Y/n ; a = 1,248,419,136$$

$$b = XY / X^2 ; b = 224,188,612$$

Nilai b positif artinya selama tahun 2007, 2008 dan 2009 jumlah modal sendiri mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa Koperasi MGR Kabupaten Purworejo dalam menjalankan usahanya mengalami perkembangan usaha karena modal sendirinya mengalami kenaikan.

4. Untuk menganalisis perkembangan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi MGR Kabupaten Purworejo selama tahun 2007, 2008 dan 2009 dilakukan perhitungan di tabel (30).

Nilai b positif artinya selama tahun 2007, 2008 dan 2009 jumlah sisa hasil usaha mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa Koperasi

MGR Kabupaten Purworejo dalam menjalankan usahanya mengalami perkembangan usaha karena sisa hasil usahanya mengalami kenaikan.

Tabel 8. Perhitungan Perkembangan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi MGR Kabupaten Purworejo

Tahun	SHU Setelah Pajak (Y)	X	XY	X ²
2007	25,164,874	-1	-25,164,874.00	1
2008	28,024,255	0	0.00	0
2009	29,374,972	1	29,374,972.00	1
Jumlah	82,564,101.00	0	4,210,098.00	2

$a = Y/n$; $a = 27,521,367$
 $b = XY / X^2$; $b = 2,105,049$

Karena nilai b positif dari modal sendiri dan sisa hasil usaha selama tahun 2007, 2008 dan 2009, dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Modal sendiri dan SHU Koperasi MGR Kabupaten Purworejo pada tahun 2007, 2008 dan 2009 mengalami perkembangan, diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 14/Per/M.KUKM /XII /2009 dengan menggunakan 7 aspek penilaian tingkat kesehatan koperasi, Koperasi KPRI KBK Kabupaten Purworejo selama tahun 2007, 2008 dan 2009 termasuk dalam kategori "Cukup Sehat" dengan nilai masing-masing 75; 74 dan 74. Sedangkan koperasi Koperasi KPRI MGR Kabupaten Purworejo juga termasuk dalam kategori "Cukup Sehat" dari tahun 2007, 2008 dan 2009 dengan nilai masing-masing 70,40; 68,90 dan 69,00 Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Koperasi KPRI KBK dan MGR Kabupaten Purworejo selama tahun 2007, 2008 dan 2009 memiliki predikat "Sehat", ditolak.
- Jumlah modal sendiri dan sisa hasil usaha selama tahun 2007, 2008 dan 2009 dari Koperasi KPRI KBK dan MGR Kabupaten Purworejo mengalami kenaikan karena tingkat kecenderungan selama tiga tahun tersebut positif. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Modal sendiri dan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi KPRI KBK dan MGR Kabupaten Purworejo pada tahun 2007, 2008 dan 2009 mengalami perkembangan, diterima

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, bagi Koperasi KPRI KBK dan MGR Kabupaten Purworejo

hendaknya melakukan peningkatan komponen-komponen yang dapat meningkatkan modal sendiri seperti meningkatkan jumlah simpanan-simpanan yang ditanamkan anggota ke koperasi. Selain itu Koperasi KPRI KBK dan MGR Kabupaten Purworejo hendaknya melakukan pembukaan simpanan berjangka maupun fasilitas pinjaman dengan bunga yang menarik dan bersaing dengan perbankan untuk meningkatkan skor pada aspek permodalan dan melakukan penekanan biaya-biaya operasional untuk dapat meningkatkan aspek penilaian efisiensi pada rasio beban usaha terhadap SHU Kotor. Dinas Koperasi juga hendaknya melakukan sosialisasi penilaian kesehatan koperasi secara berkala dan teratur sehingga pihak koperasi yang ada bisa menilai sendiri kesehatan unit simpan pinjamnya, dan bisa mengatasi apabila terjadi penurunan skor pada aspek penilaian koperasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2009. *Tentang Klasifikasi Koperasi Papan Atas*. Disperindagkop Purworejo.
- Anonim. 2009. Peran Koperasi Dalam Perekonomian. http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_6175/title_perankop-dalam-perekonomian-indonesia/. Senin, 1 Maret 2010.
- Baswir, Revrison. 1997. *Koperasi Indonesia*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Chesnick, David S. 2000. *Financial Management and Ratio Analysis for Cooperative Enterprises*. Rural Business-Cooperative Service U.S. Department of Agriculture. Research Report 175. Pages 2.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE. Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No : 351/KEP/M/XII/1998. *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 96/Kep/M.KUKM/IX/2004. *Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995. *Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi*.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tanggal 14 November 2008. *Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009. *Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*.
- Riyanto, Bambang. 1995. *Dasar-Dasar Pembelian Perumahan*. Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada. Yogyakarta.
- Sitio, Arifin dan Halamoan Tamba. 2001. *Perkoperasian: Sejarah, Teori, dan Praktek*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- _____. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktek*. Erlangga. Jakarta.
- Sumarti. 2007. *Analisis Kinerja Keuangan pada Bank Syariah Mandiri di Jakarta*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Undang – Undang No. 25 tahun 1992. *Tentang Perkoperasian*, Jakarta, 1992.
- Widiyanti, Ninik dan Y.W. Sunindhia. 1992. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Anonim. 2009. *Tentang Klasifikasi Koperasi Papan Atas*. Disperindagkop Purworejo.
- Anonim. 2009. Peran Koperasi Dalam Perekonomian. http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_6175/title_perankoperasi-dalam-perekonomian-indonesia/. Senin, 1 Maret 2010.
- Baswir, Revrison. 1997. *Koperasi Indonesia*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Chesnick, David S. 2000. *Financial Management and Ratio Analysis for Cooperative Enterprises*. Rural Business-Cooperative Service U.S. Department of Agriculture. Research Report 175. Pages 2.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE. Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 351/KEP/M/XII/1998. *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 96/Kep/M.KUKM/IX/2004. *Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995. *Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi*.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tanggal 14 November 2008. *Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009. *Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*.
- Riyanto, Bambang. 1995. *Dasar-Dasar Pembelian Perumahan*. Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada. Yogyakarta.
- Sitio, Arifin dan Halamoan Tamba. 2001. *Perkoperasian: Sejarah, Teori, dan Praktek*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- _____. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktek*. Erlangga. Jakarta.
- Sumarti. 2007. *Analisis Kinerja Keuangan pada Bank Syariah Mandiri di Jakarta*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Undang – Undang No. 25 tahun 1992. *Tentang Perkoperasian*, Jakarta, 1992.
- Widiyanti, Ninik dan Y.W. Sunindhia. 1992. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.